



**Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia**

Siaran Pers Nomor: 307/HUMAS PMK/XI/2022

Pemerintah Tangani Gempa Cianjur Secara Simultan

***Mulai Relokasi, Bangun 200 Rumah Tahan Gempa Tipe 36 Lahan 90 M2**

KEMENKO PMK – Sebagai upaya agar penanganan dampak gempa Cianjur lebih efektif, kegiatan tanggap darurat bencana dengan rehabilitasi dan rekonstruksi akan dilakukan secara simultan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, hingga saat ini pemerintah terus melakukan pendataan rumah yang terdampak rusak ringan, sedang hingga berat. Ia memerintahkan pihak terkait melakukan pendataan secepat mungkin agar dapat segera dilakukan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Adapun menurut data dari BNPB per 30 November 2022, sudah terverifikasi sebanyak 17.864 rumah rusak dari seluruh kategori rusak berat, rusak sedang, rusak ringan (RB, RS, RR) termasuk 190 rumah ibadah, 14 faskes, 511 fasilitas pendidikan, 17 kantor gedung dan 2 jembatan rusak.

“Kita lakukan di tahap 1 sebanyak 8.341 rumah yang akan segera diperbaiki,” ujarnya saat memimpin rapat tingkat menteri (RTM) Penanganan Darurat dan Persiapan Penanganan Pasca Bencana Gempa Cianjur, di Kantor Kemenko PMK, Kamis (1/12).

Turut hadir secara luring dan daring dalam RTM, Dirjen Cipta Karya PUPR Diana Kusumastuti, SAM PUPR Endra S, Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemensos Edi Suharto, Dirjen Anggaran Kemenkeu Putut Hari Satyaka, Deputi III BNPB Mayjen TNI Fajar Setiawan, Deputi IV BNPB Jarwansah, Waasops Panglima TNI Marsma TNI Dr. Budi Achmadi, Asops Kapolri Irjen Pol. Agung Setya, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Bupati Bandung Dadang Supriatna, Asisten Bupati Cianjur Herman, Walikota Sukabumi Achmad Fahmi, Kalaska BPBD dari beberapa Kab/Kota di Jabar, dan perwakilan lainnya.

Dalam pemaparannya, Menko PMK menambahkan, untuk mendukung perbaikan rumah dan fasilitas umum yang rusak, perlu dilakukan segera pembersihan puing-puing bangunan runtuh yang dikoordinir oleh BNPB dengan melibatkan TNI dan Polri.

“Kemudian dalam penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) untuk tahap rehab rekon agar dilakukan dengan cara efisien, efektif, dan akuntabel dan sesuai dengan peraturan & perundangan yang ada,” ujarnya.

Mengingat sifat bantuan dari pemerintah pusat adalah stimulan. Perlu ada prinsip keadilan untuk bantuan tambahan dari pemkab, Pemkot, pemda atau lembaga filantropi lainnya.

“Jika ada ormas, yayasan, dan lainnya ingin membantu pembangunan rumah baru, maka harus berkoordinasi dengan KemenPUPR, Pemda, Pemkab dan Pemkot,” kata Muhadjir.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pada perbaikan tahap awal juga akan dibangun rumah untuk 200 kepala keluarga di lokasi yang baru (relokasi) dengan tipe 36 dengan luas tanah 90 m².

“Beberapa rumah yang berada di lahan merah itu kan harus direlokasi, tahap pertama sudah kami siapkan 2,5 ha. Sudah land clearing dan akan kita stok rumah tahan gempa dengan teknologi RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat),” kata Basuki.

Lanjutnya, semua bangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti rumah sakit, fasilitas pendidikan, kantor dan lainnya juga akan diperbaiki oleh PUPR.

“Mudah-mudahan minggu depan sudah kita perbaiki. Selain itu, untuk TPA yang ada di lahan merah juga akan kami relokasi dan lahannya sudah ada di daerah Cikalong,” tuturnya.(*)

**Bagian Humas dan Perpustakaan,
Biro Hukum, Informasi dan Persidangan,
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
roinfohumas@kemenkopmk.go.id
www.kemenkopmk.go.id
Twitter@kemenkopmk
IG: kemenko_pmk**